

Nama: Rizka Mufidah

NPM: 2313031001

Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, anggaran sektor publik memiliki peran yang sangat penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa jenis anggaran sektor publik yang lazim digunakan, masing-masing dengan lingkup dan karakteristik yang berbeda.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN merupakan anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh DPR untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Lingkup APBN meliputi seluruh penerimaan negara, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, serta seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pusat, pembangunan nasional, pembayaran utang, dan transfer ke daerah. APBN mencerminkan kebijakan fiskal nasional dan menjadi instrumen utama pemerintah pusat dalam mengelola perekonomian negara.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan disahkan bersama DPRD. Lingkup APBD mencakup pendapatan daerah (pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja daerah, serta pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.

3. Anggaran Berbasis Kinerja.

Jenis anggaran ini menekankan pada keterkaitan antara alokasi dana dengan hasil atau kinerja yang ingin dicapai. Lingkupnya tidak hanya pada jumlah dana yang dianggarkan, tetapi juga pada output dan outcome dari setiap program dan kegiatan. Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta memperjelas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

4. Anggaran Program dan Kegiatan.

Anggaran ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Lingkupnya mencakup perencanaan tujuan program, sasaran yang ingin dicapai, serta kebutuhan dana untuk setiap kegiatan. Anggaran jenis ini memudahkan evaluasi pelaksanaan anggaran karena fokus pada aktivitas nyata yang dilakukan pemerintah.

5. Anggaran Investasi Publik.

Anggaran ini berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lingkupnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan investasi pemerintah yang manfaatnya dirasakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode anggaran.

Melalui pemahaman terhadap berbagai jenis anggaran sektor publik tersebut, kita dapat melihat bahwa anggaran tidak hanya berfungsi sebagai daftar angka, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.